

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai Dampak Kebijakan Pemekaran Kecamatan bagi Pembangunan di Kecamatan Pacar Kabupaten Manggarai Barat maka penulis menyimpulkan bahwa pemekaran kecamatan memberikan dampak positif yang signifikan dalam rangka mewujudkan pembangunan wilayah di Kecamatan Pacar. Adapun rincian kesimpulan dapat diuraikan sebagai berikut:

6.1.1. Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa kebijakan pemekaran Kecamatan Pacar menghasilkan dampak yang positif dilihat dari koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan koordinasi program kerja dan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah. Camat sudah melaksanakan tugasnya sebagai koordinator dengan baik dalam mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, camat sudah berperan dalam melakukan koordinasi bersama kepala desa seluruh Kecamatan Pacar TNI/POLRI dengan melaksanakan pertemuan secara rutin setidaknya sekali dalam 3 (tiga) bulan. Namun meski begitu, keamanan diwilayah masih kurang disebabkan oleh tidak aktifnya sistem keamanan lingkungan yang mana program pengamanan oleh masyarakat sebenarnya akan sangat efektif jika masyarakat berpartisipasi aktif dan dilaksanakan dengan baik. Selanjutnya Camat sudah melaksanakan tugasnya sebagai koordinator dalam

memberikan pembinaan berupa bimbingan dan pelatihan kepada para Kepala Desa secara rutin. Namun pada penerapan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa kelihatannya belum efektif untuk seluruh desa-desa di Kecamatan Pacar oleh karena masih ditemukan dan dilaporkan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh aparat desa baik dari segi administrasi maupun pemenuhan tanggung jawab tugasnya. Selanjutnya sebagai fasilitator dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat, Camat sudah melaksanakan tugasnya dengan baik dalam menjadi mitra Kepala Desa dan program-program pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan sehingga kegiatan-kegiatan berjalan dengan lancar tanpa adanya tumpang tindih dalam pelaksanaannya.

6.1.2. Pelayanan Publik

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa kebijakan pemekaran kecamatan memberikan dampak positif yang signifikan baik kepada masyarakat maupun pemerintahan sendiri dilihat dari penyelenggaraan layanan publik dan berdasarkan kewenangan yang diberikan bupati kepada camat. Dari segi pelayanan publik masyarakat diberikan kemudahan mendapatkan pelayanan dari aspek jangkauan kantor kecamatan, estimasi waktu dalam pengurusan administrasi yang cepat, sarana dan prasarana yang cukup memadai serta kesederhanaan alur pelayanan yang memudahkan masyarakat sehingga dapat memenuhi keperluan masyarakat dengan optimal. Lalu berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh bupati kepada Camat Pacar dalam pelaksanaannya didasarkan pada lampiran perjanjian kerja yang ditandatangani oleh bupati dan camat dimana pelimpahan wewenang yang dimaksud terdiri atas pelayanan

perizinan dan non-perizinan. Namun berdasarkan keadaan lapangan yang penulis temukan dalam penelitian tidak terlihat adanya brosur fisik yang berisi persyaratan-persyaratan dalam pengurusan administrasi dan yang tersedia hanya di situs *online* saja dan diberikan sosialisasi langsung dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil dimana tidak semua elemen masyarakat dapat mengikuti kegiatan sosialisasi terkait prosedur pengurusan administrasi tersebut.

6.1.3. Pemberdayaan Masyarakat

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa kebijakan pemekaran kecamatan memberikan dampak yang positif dilihat dari partisipasi masyarakat yang cukup aktif dalam mengikuti kegiatan dalam rangka mendukung pembangunan seperti musrenbang baik yang dilaksanakan di desa maupun kecamatan. Selanjutnya tiap kegiatan pemberdayaan masyarakat memiliki pelaporan pelaksanaannya masing-masing kepada Bupati dan sudah diselenggarakan dengan baik oleh pemerintah Kecamatan Pacar berdasarkan aturan dan ketentuan yang berlaku.

6.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang penulis dapatkan terkait Dampak Kebijakan Pemekaran Kecamatan bagi Pembangunan di Kecamatan Pacar Kabupaten Manggarai Barat, maka penulis memberikan beberapa saran/rekomendasi sebagai berikut:

- 1) Kepada Pemerintah Kecamatan Pacar untuk lebih meningkatkan koordinasi dalam mengupayakan ketentraman dan ketertiban sampai sistem keamanan lingkungan kembali aktif.

- 2) Kepada Pemerintah Kecamatan Pacar diharapkan meningkatkan kualitas dan kuantitas terkait pembinaan aparatur desa agar menghasilkan sumber daya manusia yang lebih baik sehingga pembangunan wilayah baik fisik maupun non fisik dapat mencapai target yang telah ditentukan.
- 3) Kepada Pemerintah Kecamatan Pacar diharapkan dapat mempublikasikan syarat-syarat pengurusan administrasi masyarakat misalnya dalam bentuk spanduk dan dipajang ditempat yang mudah terlihat oleh masyarakat yang belum tahu.
- 4) Masyarakat Kecamatan Pacar disarankan untuk aktif berpartisipasi dalam membentuk sistem keamanan lingkungan misalnya membagi kelompok dan jadwal ronda untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya tindak kriminal yang bukan tidak mungkin akan terjadi sewaktu-waktu. Bukan hanya di bidang keamanan saja tetapi juga masyarakat diharapkan terlibat dalam kegiatan pembangunan daerah lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Arikunto, Suharsimi. (2013). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Abdoellah, Awan Y., Rusfiana, Yudi. (2016). *Teori Dan Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Digdowiseiso, Kumba. (2019). *Teori Pembangunan*. Jakarta Selatan: Lembaga Penerbitan Universitas Nasional
- Effendi, Bachtiar. (2002). *Pembangunan Daerah Otonom Berkeadilan*. Yogyakarta: PT. Uhaindo dan Offset
- Faisal, Sanapiah. (2010). *Format-format Penelitian Sosial*. Jakarta: Rajawali Pers
- Meutia, Intan F. (2017). *Analisis Kebijakan Publik*. Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja
- Mustari, Nuryanti. (2015). *Pemahaman Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Leutikaprio
- Nasution, M. Arif. (2000). *Demokratisasi dan Problema Otonomi Daerah*. Bandung: Mandar Maju
- Nugroho, Tri Laksono. (2007). *Teori Administrasi Publik, Pendekatan Pembangunan, Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Era Otonomi Daerah*. Malang: Bayu Media Publishing
- Purnawati, Laily. (2014). *Proses Formulasi Kebijakan Publik*. Tulungagung: Universitas Tulungagung
- Rosidin, Utang. (2010). *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*. Bandung: Pustaka Setia
- Sadhana, Kridawati (2011). *Realitas Kebijakan Publik*. Malang: UM PRESS
- Sunarno, Siswanto. (2012). *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Wibawa, Samodra. (1994). *Evaluasi Kebijakan Publik*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Winarno, Budi. (2007). Kebijakan Publik, Teori dan Proses. Jogjakarta: Media Pressindo

B. JURNAL

Naisaban, A., Rahmah, M. Efektivitas Pemekaran Kecamatan Dalam Meningkatkan Pembangunan, 2(2), 147–158. <http://ejournal.ipdn.ac.id/JKP/article/view/913>. Diakses pada 29 September 2021, 19:56:36

Poma, M., Arsana, I., Laki, I., & Sahabi, A. (2021). Dampak Pelaksanaan Pemekaran Kecamatan dalam Meningkatkan Pembangunan Daerah, 7(4), 115-122. DOI: 10.32884/ideas.v7i4.479. <http://www.jurnal.ideaspublishing.co.id/index.php/ideas/article/view/479>. Diakses pada 17 Januari 2022, 23:36:42

C. SKRIPSI

Lantara, Lifia. (2016). Pengaruh Pemekaran Wilayah Kecamatan Terhadap Pembangunan Dan Pelayanan Publik Di Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara. Skripsi. Universitas Hasanuddin

Ramadhan, Gilang. (2019). Dampak Kebijakan Pemekaran Wilayah Kabupaten Banyuwangi (Studi Tentang Kecamatan Blimbingsari). Universitas Brawijaya.

Sapri. (2014). Dampak Pemekaran Kecamatan Dalam Pembangunan Sarana Dan Prasarana Di Kecamatan Beutong Ateuh Banggala Kabupaten Nagan Raya. Skripsi. Universitas Teuku Umar

D. INTERNET

<https://manggaraibaratkab.bps.go.id/publication/2016/07/29/c5ad67f169279b5053fbf368/kecamatan-macang-pacar-dalam-angka-2016.html>. Diakses pada 01 November 2021, 12:39:56

<https://manggaraibaratkab.bps.go.id/publication/2021/09/24/d34f6c6542cb5ab2284d144d/kecamatan-pacar-dalam-angka-2021.html>. Diakses pada 02 November 2021, 11:54:55

E. DOKUMEN

Keamatan Pacar (2022). Lampiran Perjanjian Kinerja Tahun 2022

F. PERATURAN-PERATURAN

Undang-Undang No 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan

G. WAWANCARA

Wawancara dengan Bapak Kamelus Pangge selaku Sekretaris Kecamatan Pacar. Tanggal 28-06-2022

Wawancara dengan Bapak Blasius Jehamat selaku Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Pacar. Tanggal 30-06-2022

Wawancara dengan Bapak Petrus Janggung selaku Kepala Sub Bagian Umum Kepegawaian dan Perlengkapan Kecamatan Pacar. Tanggal 01-07-2022

Wawancara dengan Bapak Samuel Daru selaku Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Pacar. Tanggal 5 Juli 2022

Wawancara dengan Bapak Dominikus Natar selaku Kepala Desa Waka. Tanggal 07-07-2022

Wawancara dengan Bapak Marianus Karim selaku Kepala Desa Manong. Tanggal 05-07-2022

Wawancara dengan Bapak Agustinus Edit selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa Waka. Tanggal 07-07-2022

Wawancara dengan Bapak Yosef Jehadu selaku Masyarakat Kecamatan Pacar. Tanggal 11-07-2022

Wawancara dengan Bapak Kornelius Irwandi selaku Masyarakat Kecamatan Pacar. Tanggal 11-07-2022

Wawancara dengan Bapak Frederik Jedaus selaku Masyarakat Kecamatan Pacar. Tanggal 14-07-2022

Wawancara dengan Ibu Flaviana Sedia selaku Masyarakat Kecamatan Pacar. Tanggal 14-07-2022